

**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH**

(Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

MEMET JULIANSYAH

NPM: 1351020192

JURUSAN: Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018

**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH**

(Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

MEMET JULIANSYAH

NPM: 1351020192

JURUSAN: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H.

Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018

ABSTRAK

Good Corporate Governance sendiri diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan etika serta peraturan perundang undangan, yang memiliki prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban, serta memiliki mekanisme struktur internal perusahaan yaitu DPS, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai penanggung jawab atas perusahaan tersebut untuk menerapkannya.

PT. BPRS berlandaskan lima prinsip dasar GCG yaitu : Keadilan (*fairness*), Transparansi (*transparancy*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*), dan kemandirian (*Independency*).

Dalam ajaran Islam, poin-poin tersebut diatas menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim diperusahaan. Islam sangat instens mengajarkan untuk diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fhatanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathon* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qiraah dan islah* (organisasi yang terus belajar dan melakukan perbaikan).

Berdasarkan data dilapangan penerapan prinsip GCG di BPRS Bandar Lampung, dari hasil observasi penulis, baik pimpinan maupun para karyawan belum sepenuhnya mengambil hati masyarakat untuk menabung di BPRS Bandar Lampung, jadi apakah GCG di BPRS ini sudah diterapkan dengan baik, hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana hasil penelitian disajikan secara deskripsi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pimpinan perusahaan telah menjalankan perannya dalam menerapkan prinsip GCG di BPRS Bandar Lampung. Penerapan GCG ini sudah berjalan dengan baik di BPRS Bandar Lampung.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGGUNAAN KONSELING KELOMPOK DENGAN
TEKNIK *RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR* UNTUK
MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI DALAM
BERINTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK DI SMP
NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG**

Nama : GHANIYA ADE ARTHA
NPM : 1111080007
Jurusan : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Andi Thahir, S.Psi., MA., Ed.D
NIP.197604272007011015

Hardiyansyah Masya, M.Pd

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam**

Andi Thahir, S.Psi., MA., Ed.D
NIP.197604272007011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PENGUNAAN KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK *RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR* UNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI DALAM BERINTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG”** Disusun Oleh : **Ghaniya Ade Artha**
NPM: 1111080007, Jurusan **Bimbingan Konseling Pendidikan Islam**, Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pada Hari Jum'at 29 Juni 2018, Pukul : 09:00-11:00 WIB di Ruang Sidang Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

: Dr. Imam Syafe'i, M.Ag

(.....)

Sekretaris

: Mega Aria Monica, M.Pd

(.....)

Pembahas Utama

: Dr. Oki Dermawan, M.Pd

(.....)

Pembahas Pendamping I

: Andi Thahir, S.Psi., M.A, Ed.D

(.....)

Pembahas Pendamping II

: Hardiyansyah Masya, M.Pd

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



H. Chairul Anwar, M.Pd

19560810 19870 31001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
Katakanlah perkataan yang benar, (QS. Al-Ahzab: 70)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda tercinta M.Syarkawi yang selalu berjuang demi cita-cita dan mimpi anaknya, ibunda tersayang Marlis yang begitu luar biasa cinta kasih dan doanya, yang takkan pernah berhenti mendukung dan memotivasi anaknya.
2. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, perhatian, kasih sayang dan semangat kepadaku
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bintuhan pada tanggal 12 Juli 1993, anak satu-satunya hasil dari buah kasih pasangan Bapak M.Syarkawi dan Ibu Marlis.

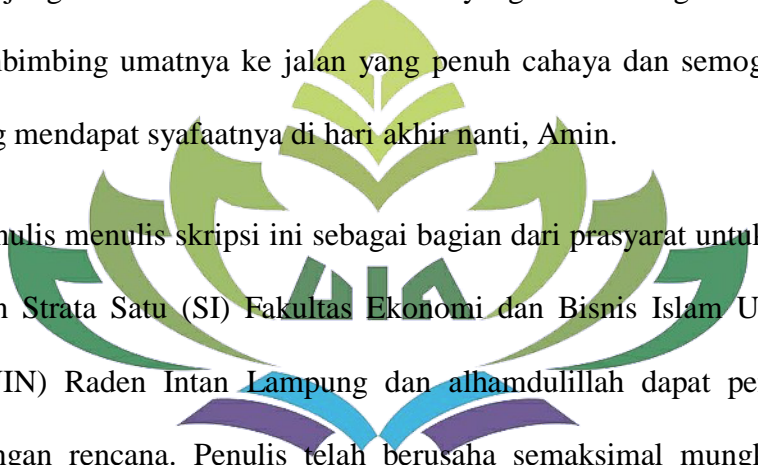
Pendidikan awal penulis tempuh semenjak umur 6 tahun di SDN 6 di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bintuhan dan selesai pada tahun 2005, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Kaur Selatan dan selesai pada tahun 2008, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Al Huda Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2011. Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di SMK Al Huda Lampung Selatan pada tahun 2011, ditahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Dengan mengambil konsentrasi pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah pada awalnya kemudian pada tahun 2016 pindah menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung hingga sekarang.

Selama penulis menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, penulis juga aktif menjadi anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Rab alam semesta, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “**Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Syariah (Study Pada BPRS Bandar Lampung)**”. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Amin.



Penulis menulis skripsi ini sebagai bagian dari prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan alhamdulillah dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berpikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Dalam upaya untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi

rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis akan menyebutkan sebagai berikut :

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Dr.Asriani,S.H.,M.H selaku pembimbing 1, Agus Kurniawan selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan, saran, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ahmad Habibi,S.E.,M.E Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. Kurniawan,M.E., Sy selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan-masukan serta motivasi kepada mahasiswanya
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data, referensi, dan lain-lain.

6. Bapak Marsono,S.E yang telah terlibat memberikan sumber data serta informasi yang akurat tentang Good Corporate Governance di BPRS Bandar Lampung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan apapun.
7. Karyawan-karyawan BPRS Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian disela-sela kesibukannya.
8. Anida Wati,S.E., terimakasih atas dukungan, motivasi, dan semangat yang diberikan, serta terimakasih selalu menemani.
9. Sahabat-sahabatku Ahmad Sangga, Anggarda Dwi Putra, S.H, Arif Hidayat, Yudi, Beni Rukmana, Arif Lukman Hakim, Ahmad Hadi,S.E, Nopriansyah Tri Sadewo, M.Irfan Dzaki, Elis Hermika Putri,S.E, Fitria Wulandari,S.H, Apriansyah,S.H, Hervin Yoki Pradikta,M.Hi, Prijan Masai,S.H, Marion, Imam Nur Rohim,S.H, Padil Hikmatiar, Anggi alvionita,S.E, Romi Destuyarta, Septian Adi Saputra, Hedardi S.Pd, Rio Apriawan, Seho Adi Pranata, Miki Saputra.
10. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013, kelas A, B, C, D terutama kelas B, terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik, yang selalu memberikan warna baru setiap hari nya selama ini.
11. Seluruh orang-orang terdekatku, kader HmI Cabang Bandar Lampung khususnya Komsyariat FEBI dan Syariah, keluarga KKN 23 Astomulyo, serta keluarga Himpunan Mahasiswa Kaur (HIMKA)

12. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Wassalam Wr. Wb



Memet Juliansyah
1351020192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Manajemen Operasional Perusahaan	
1. Pengertian Manajemen Operasional Menurut Para Ahli	23
2. Ruang Lingkup Manajemen Operasional	24
B. Good Corporate Governance	
1. Pengertian Good Corporate Governance	26
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	28
3. Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan	33
C. Pengertian Good Corporate Governance Dalam Perspektif Ekonomi Islam	

D. Penelitian Terdahulu	46
-------------------------------	----

BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
1. Sejarah BPRS Bandar Lampung	48
2. Kepengurusan.....	50
3. Profil Perusahaan	51
4. Dasar Hukum Operasional	52
5. Visi, Misi, dan Moto	54
6. Struktur Organisasi.....	56
7. Tugas dan Tanggung Jawab Unsur-unsur Pokok Organisasi.....	59
8. Pelayanan Produk.....	66
B. Penerapan GCG Di PT. BPRS	68
C. Karakteristik Responden.....	69
D. Hasil Jawaban Kuesioner (Angket) Penerapan Prinsip - Prinsip.....	71

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Implementasi Good Corporate Governance di PT. BPRS Bandar Lampung	
1. Transparansi	86
2. Akuntabilitas	87
3. Responsibilitas	88
4. Independensi	89
5. Keadilan/kewajaran.....	91

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	
.....	46
Tabel 2 Usia Responden	
.....	69
Tabel 3Jabatan Responden.....	70
Tabel 4 Hasil Jawaban Kuesioner	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permintaan Surat Pra Riset Dekan Fakultas FEBI

Lampiran 2. Balasan Surat Izin Pra Riset dari BPRS Bandar Lampung

Lampiran 3. Permintaan Surat Izin Riset Dekan Fakultas FEBI

Lampiran 4. Balasan Surat Izin Riset dari BPRS Bnadar Lampung

Lampiran 5. Surat Pernyataan Pengisian Kuesioner

Lampiran 6. Daftar kuesioner

Lampiran 7. Dokumentasi



BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Manajemen operasional perusahaan

Pengertian manajemen operasional yaitu suatu pengelolaan yang dilakukan secara optimal dan menyeluruh terhadap berbagai unsur seperti tenaga kerja, mesin, bahan mentah, peralatan, dan produk yang menjadi komoditi yang nantinya akan dijual pada konsumen. Manajemen operasional sendiri berasal dari dua kata, yaitu manage (Bahasa Inggris) yang berarti mengatur atau mengelola, dan operasional yang memiliki arti semua hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi, baik pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan barang. Manajemen perusahaan juga seringkali dikaitkan pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi produksi.

Manajemen oprasional adalah merupakan proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa sehingga mencapai sasaran yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dengan alokasi biaya yang efisien dan efektif.

1. Pengertian Manajemen Operasional Menurut Para Ahli

- a. Jay Haizer dan Barry Render: Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

- b. Edi Harjanto: Manajemen operasional dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkeeseimbangan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintergrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan.
- c. Pangestu Subagyo: Manajemen oprasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien.

2. Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Ada beberapa aspek yang paling berhubungan erat dalam ruang lingkup Manajemen operasional, antara lain:

- a. Aspek Struktural, merupakan aspek yang mengenai pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berintraksi antara satu sama yang lain.
- b. Aspek Fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajerial dan perorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimal
- c. Aspek Lingkungan, sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan.

Manajemen operasional memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena manajemen operasional sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin atau manajer operasional. Seorang manajer operasional menjadi pilar pengelola kegiatan operasional suatu perusahaan. Tugas seorang manajer operasional yaitu membuat perencanaan atau pemetaan sejumlah fungsi manajemen yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebut saja contohnya pembuatan konsep perencanaan kegiatan operasional, kegiatan pembentukan staf, pembentukan struktur, dan masih banyak lainnya.

d. Kinerja Perusahaan (Kinerja BPRS Bandar Lampung)

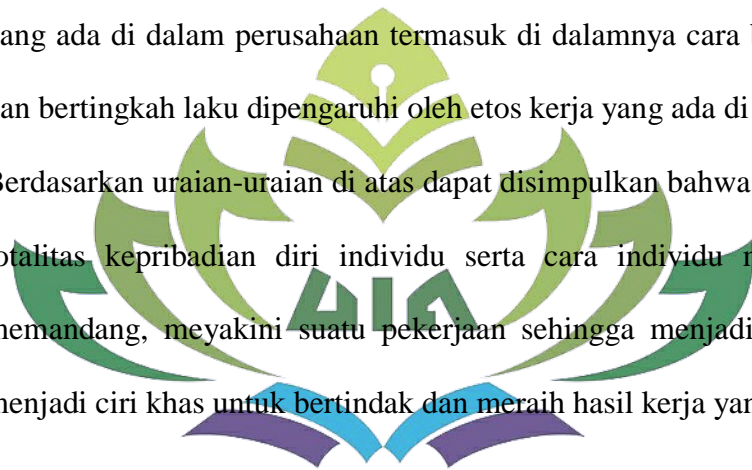
Kinerja merupakan terjemahan dari performans yang berarti untuk kerja sedangkan menurut lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dimaksud kinerja adalah “prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja, penampilan kerja/unjuk kerja” Performence atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Penelaahan kinerja perusahaan disini diawali dengan perumusan istilah “kinerja” yang dalam kamus besar. Bahasa Indonesia diartikan sebagai “suatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan , atau kemampuan kerja”

Sejalan dengan uraian diatas, maka kinerja perusahaan sangat erat kaitan dengan dengan kinerja karyawan yang harus memiliki kinerja yang bagus sesuai dengan harapan perusahaan, dalam hal ini BPRS Bandar Lampung.

Sedangkan etos kerja menggambarkan suatu sikap, maka dapat ditegaskan bahwa etos kerja mengandung makna sebagai aspek evaluatif yang dimiliki oleh individu (kelompok) dalam memberikan penilaian terhadap kerja.

Etos kerja yang baik dalam perusahaan dapat membantu karyawan untuk memahami bagaimana cara mereka bekerja menjalankan tugasnya. Etos kerja merupakan suatu perasaan, pembicaraan serta tindakan manusia yang bekerja di dalam perusahaan, jadi dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan termasuk di dalamnya cara berfikir, bersikap dan bertingkah laku dipengaruhi oleh etos kerja yang ada di perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah totalitas kepribadian diri individu serta cara individu mengekspresikan, memandang, meyakini suatu pekerjaan sehingga menjadi kebiasaan yang menjadi ciri khas untuk bertindak dan meraih hasil kerja yang optimal.



B. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta karyawan) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Pegawai atau karyawan,

pelanggan, dan staff), berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.¹

Sebagian dikutip oleh Adrian mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.²

Center For European Policy Study (CEPS), mendefinisikan *Good Corporate Governance* ialah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan.³

Sedangkan menurut Noensi seorang pakar *Good Corporate Governance* dari Indo Consult, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai social budaya yang tinggi, serta tata kelola perusahaan yang sehat.⁴

Syakhroza mendefinisikan *Good Corporate Governance* dalam pandangan syariah sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas,

¹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm.1

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.35

pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Pegawai atau karyawan, pelanggan, dan staff). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan.⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang sehat berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, nilai sosial dan etika, agar mampu menciptakan kinerja perusahaan dengan baik serta melindungi hak pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.2.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dipengaruhi oleh:⁶

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menyerukan manusia harus bersikap jujur dan terbuka dalam segala tindakan yaitu Q.S Al Muthaffifi ayat 1 :

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”⁷

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas

⁶ Wahyudin Zarkasyi, *Op.Cit*, hlm.111.

⁷ Al Muthaffifi (83) : 1

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam hal ini pula Islam menekankan kepada manusia agar memiliki sikap yang adil serta sesuai dengan takarannya terutama dalam bermuamalah seperti yang ditegaskan Q.S Huud:85 yang berbunyi :

Artinya:

*“Dan Syu’aib berkata:”Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”*⁸

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita, seperti yang dijelaskan Q.S Al Qashash : 77 yaitu:

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan

⁸ Huud (11) : 85

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁹

4. Independensi (Independency)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini pula yang diterapkan dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Dengan kata lain dalam suatu kepemimpinan itu harus bersifat mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh Q.S Faathir : 18:

Artinya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekali pun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allahlah kembali(mu).”¹⁰

⁹ Al Qashash (28) : 77

¹⁰ Faathir (35) : 18

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar. Dengan kata lain Islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan seperti yang dijelaskan oleh Q.S Al Maidah : 8 di bawah ini

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang—orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Sedangkan Syariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam,

¹¹ Al Maaidah (5) : 8

khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹² Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (Syariah Compliance), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, menjadi penting karena alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (syariah compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah. Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu, penerapan syariah governance bank syariah merupakan keharusan dan hal ini diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

3. Peran Good Corporate Governance dalam Perbankan

The Organization for economic Cooperation and development (OECD) pada tahun 1998 telah mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan secara umum, hal ini mengingat prinsip-prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi diberbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, serta lingkungan yang berbeda.

¹² Muhammad Antonio Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta Tazkia Institute, 1999), 12.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemilik perusahaan
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh perangkat perusahaan
- c. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan
- d. Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka *Good Corporate Governance* harus dapat memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.¹³

C. Pengertian *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komperhensif untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah.

Maqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini.¹⁴

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi,

¹³ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, Hal.34

¹⁴ Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar* (Universitas Muhammadiyah : Purwokerto) hlm.4

politik, sosial, maupun budaya.¹⁵ Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar : 38 :

Artinya:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang apayang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”, kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.”¹⁶

Hakikat Tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Illahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.¹⁷

¹⁵ Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Bussines and economic Ethic (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) Hlm.52

¹⁶ Departemen Agama RI, Al Ally, Al-Quran dan Terjemahannya, Cp Penerbit diponogoro, Bandung, 2005.

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012)

2. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam Q.S at-Taubah : 109:

Artinya:

*Maka Apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.*¹⁸

Dalam melakukan sesuatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

3. Equilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-'adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-'adalah atau keadilan sebagai

¹⁸ Departemen Agama RI, Al Ally, Al-Quran dan Terjemahannya, Cp Penerbit diponogoro, Bandung, 2005

manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman: 7-9:

Artinya:

*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*¹⁹

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4. Kemaslahatan

Secara umum, kemaslahatan diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindari diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:

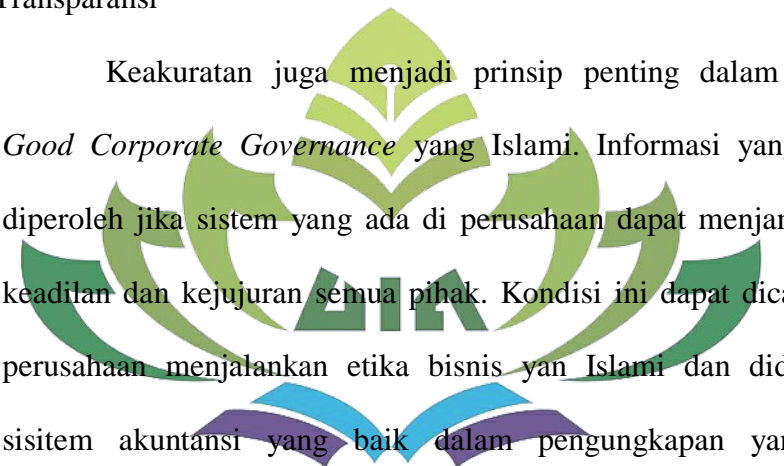
- a) Pemeliharaan agama (*hifdzud-din*)
- b) Pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*)
- c) Pemeliharaan akal (*hifhzul-‘aql*)
- d) Pemeliharaan keturunan (*hifhzul-nasl*)

¹⁹ Departemen Agama RI, Al Ally, Al-Quran dan Terjemahannya, Cp Penerbit diponogoro, Bandung, 2005.

e) Pemeliharaan (*hifhzul-maal*)

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh OECD maupun KNKG. Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Penjelasan kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut.²⁰

1. Transparansi



Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik

²⁰ Amiur Nuruddin, Veithzal Rival, *Islamic Bussines and Economic Ethic* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) Hlm.38.

Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita, seperti yang dijelaskan Q.S Al Qashash ayat 77 yaitu:

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²¹

4. Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *Istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi mendengar

²¹ Al Qashash (28) : 77

perkataan dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun.

5. Keadilan

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah di atur dalam Al-Quran (2 : 283), juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggaraannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.

Keunggulan utama *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan *Good Corporate Governance* disebabkan karena cakupan *Good Corporate Governance* yang lintas sektoral. *Good Corporate Governance* dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makro ekonomi, teori organisasi, teori konsumsi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik.

Sementara Syakhroza mendefinisikan *Good Corporate Governance* dalam pandangan syariah sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-rinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hal ini dijelaskan pula dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi

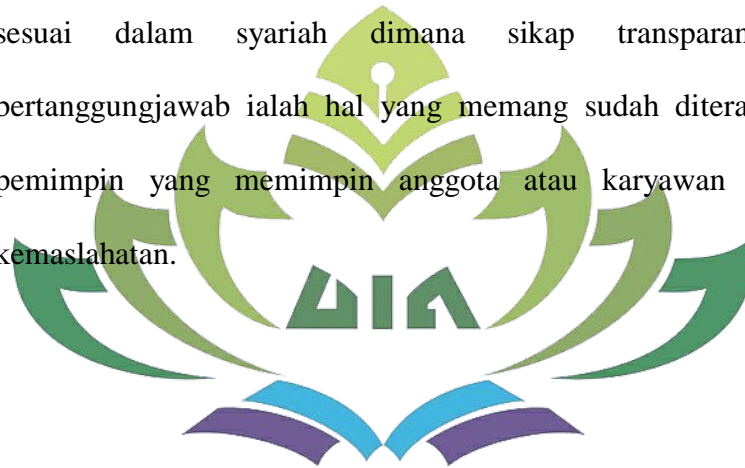
Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²²

²² Departemen Agama RI, Al Ally, Al-Quran dan Terjemahannya, Cp Penerbit diponogoro, Bandung, 2005.

Tata kelola organisasi secara baik, bukan hanya dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Tetapi dalam mekanisme internal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut.

Dari beberapa pendapat para ilmuwan di atas dipahami bahwa *Good Corporate Governance* suatu mekanisme dan struktur serta aturan yang sesuai dalam syariah dimana sikap transparansi, adil serta bertanggungjawab ialah hal yang memang sudah diterapkan oleh setiap pemimpin yang memimpin anggota atau karyawan agar terciptanya kemaslahatan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu kiranya judul skripsi ini perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahfahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan judul proposal skripsi ini “Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Syariah”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memahami maksud judul skripsi, terlebih dahulu diperlukan penegasan terhadap kata-kata dalam judul yang dianggap perlu sebagai berikut :

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Good Corporate Governance adalah tata kelola yang baik, sebuah usaha perusahaan untuk mendekati garis orbit menuju pusat spiritual, seperti

¹Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.58

akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), prinsip keterbukaan (*transparency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*)”.²

3. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan menjadikan maju atau secara pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.³
4. Perbankan Syariah berdasarkan Undang Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴
5. BPR/BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Dari penjabaran kata-kata kunci, penulis ingin menegaskan maksud dalam judul ini adalah penyelidikan secara terperinci untuk melihat apakah terdapat peningkatan, perubahan atau kemajuan dalam pengembangan perbankan syariah melalui Good Corporate Governance.

² .Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 41.

⁴ .Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, AsaMandiri, 2008, hlm. 3.

⁵ Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, cet. ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013), hlm. 33.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

- a. Alasan memilih judul ini adalah ingin mengungkapkan secara real apakah dengan Good Corporate Governance memberikan pengaruh terhadap tingkat pengembangan Perbankan Syariah.
- b. Judul ini dipilih karena keingintahuan penulis untuk mengetahui pandangan Perbankan Syariah tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah.

2. Alasan Subyektif

Karena Judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti, dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini termasuk salah satu bidang studi keilmuan yang penulis tekuni yaitu jurusan Perbankan Syariah, serta tersedianya literatur yang cukup dan mendukung sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan Syariah menjadi

semakin penting.⁶ GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko financial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di Bank Syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).⁷

Industri perbankan syariah merupakan bagian dari penopang sektor riil, memiliki kewajiban pula dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG).⁸ Kewajiban ini merupakan amanah dari pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG, karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini dikeluarkan dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah

⁶Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah(UUS) pada bagian umum.

⁷ M.Umer Chapra dan Habib Ahmed (2002).Islamic Governance In Islamic Financial Institutions(Jeddah:Islamic Research dan Islamic Institute,IslamicDevelopment Bank).Hlm.50-71.

⁸Muh .Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 138

harus memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

Dengan demikian, dapat dikatakan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Dalam rangka itulah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) membentuk tim kerja Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi (Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagainya) menyusun konsep pedoman tersebut.⁹

Pada 3 November 2011, KNKG meluncurkan pedoman GGBS. Dengan diluncurkannya GGBS, maka pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah di Indonesia. Dengan menjalankan

⁹ Keberlangsungan bisnis syariah dengan menerapkan *Good Governance* terefleksi bagaimana perusahaan memperhatikan *stakeholders* perusahaan, memberikan nilai tambah (*add value*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Lihat Moh Ghofur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, 129.

GGBS diharapkan bisnis yang dijalankan oleh bank syariah akan lebih efektif dan memungkinkan bank syariah untuk tetap berkelanjutan.¹⁰

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi disektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance*.

Penerapan GCG di bank syariah dan konvensional menggunakan prinsip-prinsip sama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.¹¹ Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*syaria compliance*).¹² Penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG

¹⁰ *Ibid*, Hal. 130

¹¹ Peraturan Bank Indonesia (PB) No.11/33PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Ayat 10.

¹² Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud (2007). *Islamic Banking*. Burhan Subrata et al (terj.), *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), Hlm. 214.

dalam dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah kearah yang lebih maju.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG bahwa harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*), dan pertanggung jawaban (*responsibility*). Selain itu prinsip dasar pelaksanaan GCG ini juga dijelaskan dalam pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS). Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan berdasarkan hadist yang menyatakan “barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”. Maka transaksi harus dilakukan secara transparan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah, sebagaimana tercermin dalam Q.S Al-Isra: 84

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

“ Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”.

Dan dalam ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas

Dalam hubungannya dengan asas responsibilitas, pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra: 14

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

“Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawaban). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.”

Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik.

4. Indepedensi

Dalam hubungannya dengan asas *independency*, bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Indepedensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko.¹³ Independen merupakan karakter manusia yang bijak yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 4: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



¹³ Q.S.Fushilat:30

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlakulah adil kamu karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Hal ini ditegaskan pula dalam Q.S Asy-Syu'araa: 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹⁴

Tanpa adanya penerapan *Corporate Governance* yang efektif, bank syariah tidak akan dapat memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *Corporate Governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi bank syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.¹⁵

¹⁴Asy-Syu'araa'(42): 183

¹⁵Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Bumi Aksara,2008).hlm13.

Perbankan Syari'ah dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank Syariah pertama di Propinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Propinsi Lampung dengan Modal Dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar – Lampung Selatan.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.

Dengan penerapan GCG BPRS dapat dapat membuat masyarakat meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

Kinerja BPRS Bandar Lampung terutama di sektor pembiayaan pada posisi April 2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan aset. Tercatat pembiayaan tumbuh 17,6% atau Rp9 miliar dengan total sudah mencapai Rp60 miliar dari target hingga akhir tahun tumbuh 20% mencapai Rp.62 miliar dari capaian periode 2016 Rp51 miliar. Direktur Utama BPRS Bandar Lampung Ridwansyah mengatakan, pada kinerja BPRS Bandar Lampung terlihat pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi hingga 17,6% dibandingkan pertumbuhan aset yang baru di angka 4,4% atau bertambah Rp3 miliar. Dan total aset sudah mencapai Rp67 miliar dari target akhir tahun Rp77 miliar atau tumbuh 15%. Adapun, capaian dana pihak ketiga (DPK) pada April 2017 sudah mencapai Rp49 miliar dari target Rp54 miliar. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari kepercayaan masyarakat yang saat ini sudah mencapai 7.000 nasabah.¹⁶

Dari uraian diatas maka dapat dipahami Good Corporate Governance dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perbankan syariah. Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kegiatan tersebut, melalui penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:”ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE

¹⁶ Wawancara Bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 2018

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Jaringan Layanan BPRS ?
2. Bagaimana Good Corporate Governance dalam perspektif Ekonomi Islam ?

E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance pada BPRS
2. Mengetahui Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam

2.Kegunaan penelitian

1. Bagi praktisi perbankan syari'ah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya merumuskan dan menerapkan Good Corporate Governance pada perbankan syari'ah.

2. Bagi regulator dapat dijadikan masukan-masukan dalam upaya membuat kerangka regulasi bagi perbankan syariah.
3. Bagi para akademisi dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya tentang Good Corporate Governance pada bank syariah.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok masalah, diperlukan sebuah proses mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.¹⁷ Penelitian ini pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan Good Corporate Governance dalam rangka meningkatkan perkembangan perbankan syariah.

b. Sifat Penelitian

¹⁷ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), h.32.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Pada umumnya penelitian ini bersifat deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁸

2. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Direktur dan karyawan-karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah ditetapkan sebagai responden atau sampel. Data juga diambil dengan cara mengadakan observasi di lapangan untuk melihat kondisi nyata secara visual yang ada di lapangan. Hal yang penting untuk mengambil data yang belum terungkap oleh alat pengumpul data yang lain.

b. Data Sekunder

¹⁸ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (jakarta: LP3ES, 1986), h.4.

¹⁹ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (jakarta: Erlangga, 2003), h.8.

Data sekunder meliputi data-data penunjang dari data primer yang didapatkan melalui perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, dan yang berasal dari berbagai macam literature yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik yang berarti data-data yang diperoleh dideskripsikan untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Karyawan dan Pengurus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 orang karyawan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²¹ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian.²² Menurut Suharsimi Arikunto sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar

²⁰ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.

²¹ *Ibid.* h. 58

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 85.

diambil 10-15% atau 20-25%.²³. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 orang karyawan, karena subyeknya kurang dari 100 maka diambil semua.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁴ Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang penulis gunakan antara lain:

a. Observasi

metode observasi adalah “studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat, hanya mendapatkan gambaran obyeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, V Cetakan, keduabelas (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.112

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012), h.137.

keadaan yang sesungguhnya terjadi pada observernya.²⁵ Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan Good Corporate Governance dalam rangka pengembangan perbankan syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Direktur dan karyawan-karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal ini untuk mendapatkan data-data yang ingin penulis dapatkan maka penulis melakukan wawancara bebas terpimpin kepada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁷

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan kongkrit.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Resear* (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1998), h.86.

²⁶ Soeratno dan Lincoln Arsyad, h.86.

²⁷ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h.231.

memilih secara hati-hati data relevan yang tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁸ Selanjutnya sumber (literature) dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai, relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku referensi lainnya).

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*Sistmatizing*)

²⁸ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1998), h.89.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana Good Corporate Governance dapat meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis, sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam mengikuti penulisan laporan-laporan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir deduktif. Yaitu metode yang bersifat umum, kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³¹ Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dan perbankan syariah.

²⁹ Lexy L Meleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 161.

³⁰ Sugiono, *Loc. cit* h. 243.

³¹ Koentjaraningrat, *Loc. Cit*, h. 259.

Cara menganalisis data yang diperoleh dari data, baik primer maupun sekunder, metode ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan masalah untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pengembangan, perbankan syariah, dan Good Corporate Governance. Salah satunya adalah dengan menyusun hipotesis kerja, dalam hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substansif (Yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data), dan perlu diingat bahwa hipotesis kerja itu hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

Desain penelitian ini pada tahap pembahasan penelitian, akan berisi uraian-uraian tentang objek yang menjadi fokus penelitian yang ditinjau dari sisi-sisi teori yang relevan dengannya dan tidak menutup kemungkinan bahwa desain penelitian ini akan berubah sesuai dengan kondisi atau realita yang terjadi di lapangan.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Sejarah BPRS Bandar Lampung

PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bandar Lampung atau disingkat BPRS Bandar Lampung adalah lembaga keuangan perbankan pertama berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam.¹

Pemrakarsa pendirian Bank Syariah Bandar Lampung adalah Bapak Poedjono Gubernur Lampung saat itu, bersama pejabat teras dilingkungan pemerintah provinsi Lampung dengan modal dasar saat itu sebesar Rp.500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar , Lampung Selatan.²

Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelola bank yang kurang profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai kekurangan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini menjadi bank dalam pengawasan khusus (DPK) oleh bank Indonesia. Pada tahun 2006 pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPR Syariah

¹ Company Profile Syariah Bandar Lampung (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

² *Ibid*, Hal. 1

(Bank Syariah) dengan membentuk tim pendiri bank syariah yang bekerjasama dengan konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah.

Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian bank syariah merekomendasikan ssebagai berikut:

- a. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar Syariah
- b. Menambah divisi syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, atau
- c. Mendirikan Bank baru yaitu Bank Pasar Kota Bandar Lampung

Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian bank syariah tersebut direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-.³

Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono,SH.No.20

³ *Ibid*, Hal. 2

tanggal 5 Desember 2008 tentang pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan HAM RI pada tanggal 4 November 2009. Maka dengan penyertaan modal PEMDA Kota Bandar Lampung sebesar Rp.2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.3.978.500.000,- atau 79,57%.

Pada keputusan RUPS Luar Biasa tersebut di atas juga disetujui antara lain:

- a. Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp.5 Miliar menjadi Rp.10 Miliar
- b. Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung
- c. Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke Wilayah Bandar Lampung.
- d. Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di JL.Pangeran Antasari No.148 Bandar Lampung, pada tanggal 22 Desember 2010 ditetapkan hari berdirinya BPR Syariah Bandar Lampung.⁴

⁴ *Ibid*, Hal. 3

2. Kepengurusan

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 01 Desember 2014 dan sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.22 yang dibuat oleh Notaris Adnan,SH, M.Kn., tentang Penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPR Syariah Bandar Lampung maka susunan Pengurus dan DPS BPR Syariah Bandar Lampung periode 2012-2016 adalah sebagai berikut :⁵

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : A.Rahman Mustafa,S.E,M.M.,Ak
- 2) Komisaris Anggota : Yusran Effendi,S.E.,M.E.

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Ridwansyah,S.E.,M.E.Sy
- 2) Direktur : Marsono,S.E.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua : Ismail Saleh,S.H.I
- 2) Anggota : Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag.

3. Profil Perusahaan

Tabel 1. Profil dari PT BPRS Bandar Lampung

No	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Nama Perusahaan	BPR Syariah Bandar Lampung
2	Mulai Berdiri	Tanggal 22 Desember 2008

⁵ *Ibid*, Hal. 5

3	Pemilik Saham	➤ Pemda Kota Bandar Lampung 87,,98% ➤ Pemilik Saham lainnya 12,02%
4	Alamat	JL.Pangeran Antasari No 148 Sukabumi, Bandar Lampung
5	Nama Sebelumnya	PT.BPR Syariah Sakai Sambayan PNM
6	Alamat Sebelumnya	JL.Raya Natar No.1 Muara Putih, Natar Lampung Selatan
7	Dewan Komisaris	1. A.Rahman Mustafa,S.E.,M.E.,Ak. (Komisaris Utama) 2. Yusran Effendi,S.E.,M.E. (Komisaris Anggota)
8	Dewan Pengawas Syariah	1. Ismail Saleh,S.H.I 2. Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag.
9	Direksi	1. Ridwansyah,S.E.,M.E.Sy (Direktur Utama) 2. Marsono,S.E. (Direktur)
10	Pegawai	1. Kepala Bagian = 2 Orang 2. Staf = 24 Orang

4. Dasar Hukum Operasional

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Permendagri No.24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Pengkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.91 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Sakai Sambayan PNM.
7. Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan RI No.S-1269/MK.17/1994 Tanggal 29 Agustus 1994.
8. Izin Usaha Menteri Keuangan RI No.Kep-013/MK-17/1996 Tanggal 8 Januari 1996
9. Izin Usaha Bank Indonesia No.28/205/UPBR/Bdl Tanggal 13 Februari 1996
10. Persetujuan Akuisisi Bank Indonesia No.10/16/DPbs/Bdl Tanggal 18 Februari 2008
11. Perubahan Anggaran Dasar, Akta Notaris Apasra Dhewayani, SH.No 14 tanggal 14 September 2008 tentang penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007
12. Perubahan Anggaran Dasar BPRS Bandar Lampung, Akta Notaris Bambang Abiyono, SH. No. 21 Tanggal 5 Desember 2008 yang telah mendapat pengesahan Menkum dan HAM pada tanggal 4 November 2009.

13. Peraturan Bank Indonesia No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

5. Visi, Misi, dan Motto

a. Visi

“Menjadi BPR Syariah terbaik bagi pengembangan ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung”.

b. Misi

- a) Senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan handal
- b) Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut mendukung pembangunan di provinsi Lampung melalui pelayanan sektor perbankan Syariah
- c) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat berbasis keuangan Syariah
- d) Membina kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah hingga menjadi bankable dan mandiri
- e) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

c. Motto

“Berdasar Syariah Insya Allah Lebih Barokah”

d. Usaha PT BPRS Sakai Sambayan PNM

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang berbasis syariah Islam, PT BPRS Sakai Sambayan PNM menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan depositon berjangka dengan menggunakan sistem kemitraan yang berbagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan konsep perbankan syariah Islam.
2. Menyalurkan dana-dana yang diperoleh dalam bentuk pembiayaan pada usaha-usaha produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan pekerjaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan konsep perbankan syariah Islam.
3. Menghimpun dana-dana amal yang berupa *Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* untuk tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.
4. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mitra usaha dan nasabah dalam kegiatan ekonomi dan sosial Islam agar tercipta kebersamaan dan pemerataan serta menumbuhkan sense of partnership dan sense of belonging.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada dasarnya menceritakan kejelasan dari unit-unit organisasi serta mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kejelasan di dalam berorganisasi sangat diperlukan guna memncapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Setiap organisasi memiliki struktur yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan utin serta wewenang dan tanggungjawab dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan didalam perusahaan. Bagan struktur organisasi PT BPRS Bandar Lampung.

Gambar 1. Susunan pengurus PT BPRS Bandar Lampung sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Ketua:

H.A.Rahman Mustafa,S.E.,M.M.Ak

Anggota:

H.Yusran Effendi,S.E.,MM.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua:

Ismail Saleh,S.H.I

Anggota:

Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag

DEWAN DIREKSI

Direktur Utama:

Ridwansyah,S.E.,M.E.,Sy.

Direktur:

Marsono,S.E.

KEPALA BAGIAN DAN STAF-STAF

1. KEPALA BAGIAN PEMASARAN

1. *Funding Officer*

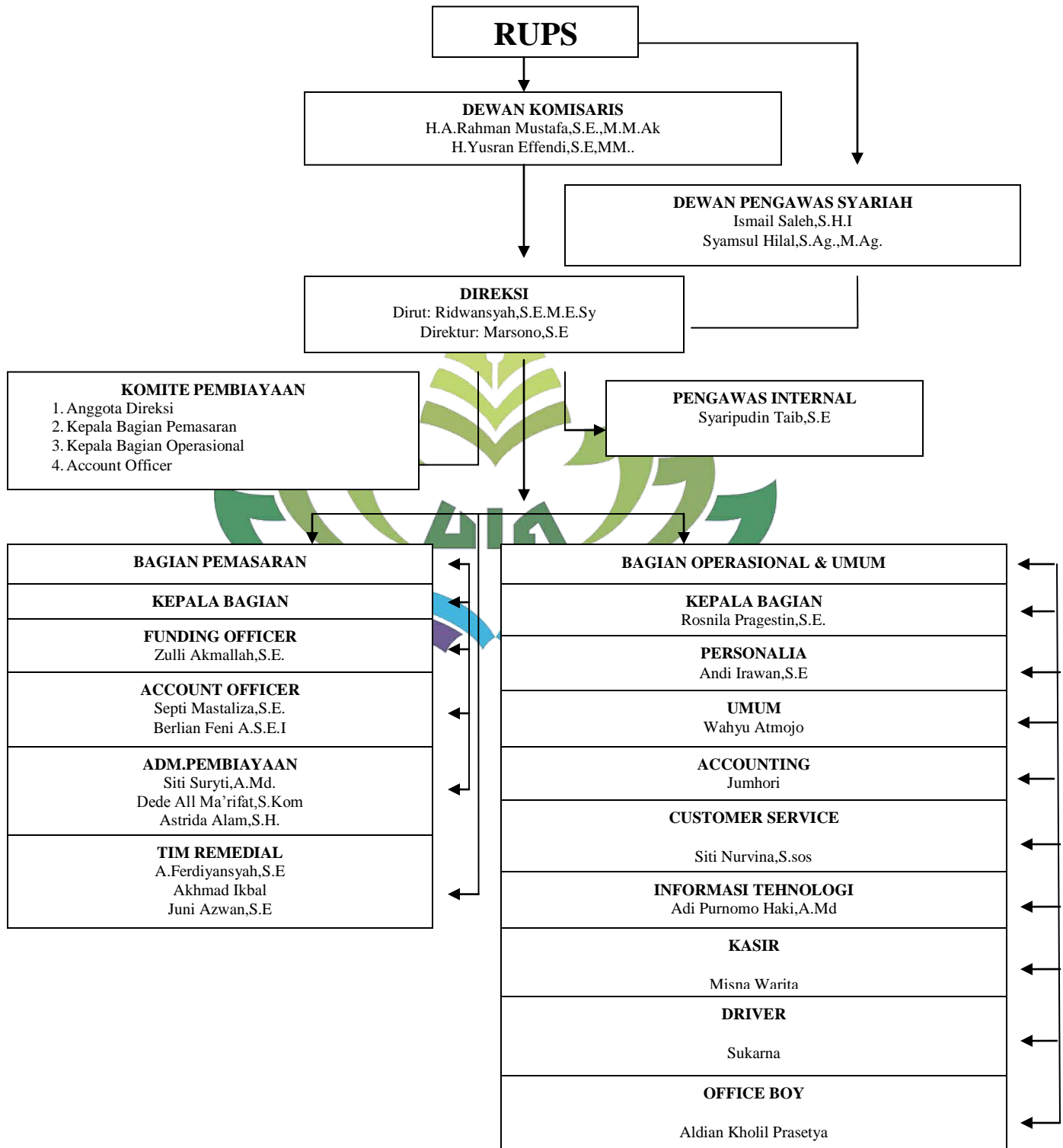
: Zuli Akmaliah

2. *Account Officer* : 1. Septi Mastaliza, S.E
2. Berlian Feni A.S.E.I
3. *Administrasi Pembiayaan* : 1. Siti Suryati, A.Md
2. Dede Ali Ma'rifat, S.Kom
3. Astrida Alam, S.H
- 2 *Tim Remedial* : 1. A. Ferdiansyah
2. Akhmad Iqbal
3. Juni Azwan, S.E

2. KEPALA BAGIAN OPERASIONAL & UMUM : Rosnila Pragestin, S.E

- a. Umum dan Personalia : Wahyu Atmojo & Andi Irawan, S.E
- b. Accounting : Jumhuri, S.E
- c. Customer Service : Siti Nurvina, S.Sos
- d. Informasi Tehnologi : Adi Purnomo Haki, AMd
- e. Kasir : Misna Warita
- f. Driver : Sukarna
- g. Office Boy : Aldian Kholil Prasetya

STRUKTUR ORGANISASI BPRS BANDAR LAMPUNG



7. Tugas dan Tanggung Jawab Unsur Unsur Pokok Organisasi

1) Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris Menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang harus dijalankan direksi
- b. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan bank yang dilakukan Direksi dan berkewajiban memberikan bantuan serta nasehat kepada Direksi
- c. Dewan Komisaris menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan yang diajukan oleh direksi
- d. Dewan Komisaris menyetujui atau menolak usulan pemberian pembiayaan diatas wewenang Direksi yang diusulkan Direksi
- e. Dewan Komisaris bersama Direksi mempertanggung jawabkan Kinerja pada Rapat Umum Pemegang saham

2) Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan pengawas Syariah berwenang menyetujui/merekomendasi atau menolak terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan/dipasarkan pada masyarakat yang diajukakn oleh Direksi
- b. Melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah Islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh bank yang telah direkomendasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

- c. Memberikan saran-saran/fatwa kepada Dewan Komisaris/Direksi untuk terlaksananya dengan baik syariah Islam dalam operasional bank

3) Dewan Direksi

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mengelola perseroan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar perseroan dengan berpedoman kepada kebijakan pokok yang ditetapkan oleh dewan komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara program kerja Direksi.
- b. Mewakili perseroan didalam dan diluar pengendalian tentang segala hal dan segala kejadian.
- c. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran perusahaan dan tiap-tiap tahun sebelum tahun kerja berjalan dan harus mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisaris serta menjalankannya dengan konsisten dan konsekuen.
- d. Direksi wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk setiap produk yang dipasarkan kepada masyarakat
- e. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun.

4) Komite Pembiayaan

- a. Membantu Direksi dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan (memorandum pembiayaan) untuk jumlah pembiayaan tertentu
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dalam mengambil keputusan yang menyangkut pemberian pembiayaan
- c. Keanggotaan Komite Pembiayaan ditetapkan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari: Direktur, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian Operasional, dan *Accounting Officer*.

5) Kepala Bagian Pemasaran

- a. Membantu Direksi dalam menyusun perencanaan pembiayaan dan program pemasaran bank
- b. Mengkoordinir penyusunan program aktivitas dan strategi pemasaran serta rencana kerja lingkup pemasaran untuk periode tahun berikutnya
- c. Memberikan rekomendasi advis pembiayaan calon nasabah debitor kepada Direksi
- d. Mengkoordinir pembuatan/penyampaian laporan ekstern sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia
- e. Menyampaikan, mengurus serta membuat laporan hasil pembahasan komite pembiayaan yang telah disetujui oleh hasil rapat

6) *Funding Officer*

- a. Menghimpun dana pihak ketiga, baik berupa tabungan maupun deposito sesuai dengan target yang diberikan oleh bank
- b. Memberikan usulan dan saran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan mobilisasi dana tabungan dan deposito kepada kepala bagian pemasaran
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup dan fungsi sebagai *funding officer*.

7) *Account Officer*

- a. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan berlandaskan pola pembiayaan syariah serta tetap mengacu pada prinsip *prudential banking*
- b. Memproses permohonan pengajuan pembiayaan calon mitra hingga tuntas
- c. Melakukan survei dan transaksi jaminan
- d. Menangani keabsahan (legalitas) jaminan
- e. Mengenai legalitas berkas-berkas yang berkaitan dengan persiapan penyaluran dan penanganan pembiayaan bank
- f. Membuat register calon mitra pembiayaan bank
- g. Membuat register mitra pembiayaan bank
- h. Membuat daftar proyeksi dan realisasi pembayaran angsuran mitra pembiayaan bank

- i. Melaksanakan kegiatan penagihan kepada para mitra pembiayaan bank

8) Administrasi Pembiayaan

- a. Menyelenggarakan administrasi tata usaha pembiayaan mulai dari pendaftaran calon nasabah sampai dengan terealisasinya pembiayaan
- b. Menyelenggarakan pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan bagi nasabah yang telah disetujui seperti akad pembiayaan, warkat jaminan dan sebagainya yang menyangkut realisasinya pembiayaan nasabah
- c. Menyelenggarakan pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan bagian pembiayaan antara lain:
 - 1) Laporan bulanan dan BMPK
 - 2) Laporan fasilitas pembiayaan yang akan jatuh tempo
 - 3) Laporan daftar nominatif nasabah pembiayaan
 - 4) Laporan pembiayaan bermasalah dan pembuatan kolektibilitas
 - 5) Laporan cadangan kualitas aktiva produktif
 - 6) Laporan perhitungan pendapatan untuk periode 1 bulan
 - 7) Laporan yang diperlukan ekstern dan intern bank

9) Tim Remedial

- a. Menyusun klasifikasi kualitas penyaluran pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dengan melihat dari segi kemungkinan penyelesaian yang meliputi tingkat kooperatif mitra pembiayaan bank

- b. Melakukan pendataan objek jaminan atas hutang pembiayaan berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak
 - c. Menyusun program penyelesaian, tata cara, jangka waktu, dan proyeksi hasil penyelesaian termasuk kemungkinan penyitaan dan penjualan
 - d. Mengeksekusi jaminan mitra pembiayaan bank
 - e. Menangani dengan segera pengalihan atau penyelesaian hutang mitra pembiayaan bank melalui penjualan objek jaminan
 - f. Menangani pelelangan jaminan mitra pembiayaan bank
- 10) Kepala Bagian Umum dan Operasional
- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina semua kegiatan personil pada bagian sekretariat serta personalia dan perbekalan
 - b. Melaksanakan peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen maupun ketentuan pemerintah
 - c. Mengkoordinir pembuatan, pengiriman, penyimpanan dokumen-dokumen baik intern maupun ekstern
 - d. Mengkoordinir dan menyelenggarakan serta mengurus segala sesuatu tentang kepegawaian dan terlaksananya hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan berlaku
 - e. Mengkoordinir dan membuat laporan kepada *manajemen* mengenai kebutuhan biaya operasional untuk perlengkapan kantor, pemeliharaan inventaris dan lain-lain yang menunjang operasional bank

- f. Membuat dan melaksanakan administrasi, perhitungan dan pembayaran hak-hak karyawan berupa upah, gaji, honor, tunjangan-tunjangan, uang lembur, dan lain-lain menurut ketentuan dan peraturan yang telah digariskan
- g. Membantu Direksi dalam perencanaan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat dan pihak lain yang dipercayakan pada bank serta mengatur likuiditas bank
- h. Membuat dan menyusun rencana kerja dan program aktivitas dalam ruang lingkup urusan operasional untuk periode tahun berikutnya
- i. Mengkoordinir, mengarahkan, membina, dan mengawasi semua kegiatan personil yang dibawahnya
- j. Memantau semua kegiatan operasional dan menjamin lancarnya alur kerja dilingkungan urusan operasional

11) Kasir

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayarkan uang kas atas nama bank dengan memperhatikan keabsahan dari dokument atau warkat keuangan tersebut
- b. Menghitung dan menerima uang setoran dari nasabah berupa tabungan, deposito serta setoran pembiayaan
- c. Membayarkan uang atas nama bank berupa tabungan dan deposito setelah mendapat persetujuan dari bagian jasa nasabah
- d. Menyelenggarakan pencatatan junal kas harian, buku kas

- e. Menghitung dan mencocokkan bukti-bukti transaksi keuangan yang dicatat dalam mutasi kas harian baik uang yang keluar maupun yang diterima dengan uang kas

12) Customer Service

- a. Membantu nasabah dalam membuat buku tabungan
- b. Memberikan informasi nasabah terkait dengan produk bank maupun kegiatan bank lainnya

13) Accounting

- a. Membuat laporan keuangan berkala bank
- b. Membuat transaksi-transaksi keuangan bank

8. Pelayanan Produk

Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani masyarakat dalam 3 jenis produk, yaitu sebagai berikut :

a. Simpanan

Jenis Produk Simpanan terdiri dari sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Tabungan Syariah Titipan | (Al-Wadiah) |
| 2) Tabungan Syariah Umum | (Al-Mudharabah) |
| 3) Tabungan Pelajar | (Al-Mudharabah) |
| 4) Tabungan Sikencana | (Al-Mudharabah) |
| 5) Tabungan Haji | (Al-Mudharabah) |

6) Tabungan Qurban (Al-Mudharabah)

7) Deposito Berjangka Syariah (Al-Mudharabah)

b. Pembiayaan

Produk Pembiayaan berdasarkan Akad sebagai berikut:

1) Pembiayaan jual beli (Al-Murabahah)

2) Pembiayaan Bagi Hasil (Al-Mudharabah)

3) Pembiayaan Penyertaan Modal (Al-Musyarakah)

4) Pembiayaan untuk sewa manfaat (Ijarah Multijasa)

5) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

Produk Pembiayaan berdasarkan Penggunaan

1) Modal Kerja (Al-Murabahah, Al-Mudharabah)

2) Investasi (Al-Murabahah)

3) Konsumtif (Al-Murabahah)

Produk Pembiayaan berdasarkan Sasaran Penyaluran:

1) Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM)

2) Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3) Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD

4) Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi/Swasta

5) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

c. Jasa Lainnya

Produk Jasa Lainnya meliputi sebagai berikut:

1) Jasa Transfer dana antar Bank

- 2) Fasilitas Penjualan Pulsa, dan
- 3) Jasa Pembayaran Rekening Listrik

B. Penerapan GCG Di PT. BPRS

Good Corporate Governance merupakan perwujudan akhlak dalam Islam. Prinsip-prinsip GCG dalam Islam ialah tauhid, taqwa dan ridha, dan kemaslahatan. Prinsip pelaksanaan GCG pada PT.BPRS adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan Independency. Adapun hasil penelitian di PT.BPRS dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dan dari hasil wawancara penulis dengan Direktur PT.BPRS Bandar Lampung Bapak Marsono,S.E, bahwasannya manajemen sudah melaksanakan kewajiban dengan baik dan kinerja karyawan sudah bagus, para karyawan sudah semaksimal mungkin mengerjakan tugas masing-masing. Tetapi masih ada karyawan yang tidak bisa menjelaskan kepada nasabah, ketika ada nasabah yang bertanya terkait perbankan syariah. Karyawan-karyawan ini adalah beberapa karyawan baru.⁶

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa PT.BPRS Bandar Lampung ini telah mengimplementasikan pedoman konsep manajemen yang mengatur sikap dan tingkah laku karyawannya. Diantaranya adalah dengan penerapan prinsip GCG perusahaan untuk merumuskan karakteristik tertentu dalam perusahaan dan penerapan *Good Corporate Governance* untuk menjadi

⁶ Wawancara dengan Bapak Marsono,S.E, Direktur BPRS Bandar Lampung, Januari 2018

landasan yang kokoh dalam menjalankan manajemen perusahaan PT.BPRS Bandar Lampung.

C. Karakteristik Responden

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas yaitu dimulai dari usia, dan jabatan. Hal ini bertujuan mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada Direktur dan karyawan PT.BPRS Bandar Lampung dengan jumlah responden sebanyak 14 orang

a. Usia Responden

Tabel 2
Distribusi jawaban responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase(%)
1	25-35	14	58,33%
2	36-45	10	41,67%
3	>46	0	0%
	Jumlah	24	100 %

Sumber : data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 25-35 tahun adalah 14 orang dengan persentase 58,33%, kemudian responden yang berusia 36-45 adalah 10 orang dengan persentase 41,67 %, sedangkan responden yang berumur >46 berjumlah 0 orang dengan persentase 0%.

b. Berdasarkan Jabatan Responden

Tabel 3
Pekerjaan responden

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Staf F.O	3	12,5%
2	Staf Akuntansi	1	4,17%
3	Staf Personalia	1	4,17%
4	Kabag Operasional	1	4,17%
5	Teller	2	8,33%
6	Customer Service	1	4,17%
7	Staf Marketing Pembiayaan	1	4,17%
8	Staf Umum	1	4,17%
9	AO	3	12,5%
10	Staf Adm Pembiayaan	4	16,67%
11	SPI	1	4,17%
12	Tim remedial	4	16,67%
13	Informasi teknologi	1	4,17%
	Jumlah	24	100%

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden yang menjadi Staf F.O berjumlah 3 orang atau 12,5 %, jumlah jabatan responden Staf Akuntansi sebesar 1 orang atau 4,17 %, jumlah responden yang jabatan menjadi Staf Personalia sebesar 1 orang atau 4,17 %, jabatan responden yang menjadi kabag Operasional berjumlah 1 orang atau 4,17 %, responden yang menjadi Teller berjumlah 2 orang atau 8,33 %, jumlah jabatan responden Customer Service sebesar 1 orang atau 4,17 %, jumlah responden

yang jabatan menjadi Staf Marketing sebesar 1 orang atau 4,17 %, jabatan responden yang menjadi Staf Umum berjumlah 1 orang atau 4,17%, jabatan responden yang menjadi AO berjumlah 3 orang atau 12,5%, responden yang menjadi Staf Adm Pembiayaan berjumlah 4 orang atau 16,67 %, jumlah jabatan responden SPI sebesar 1 orang atau 4,17%, jumlah responden yang jabatan menjadi remedial sebesar 4 orang atau 16,67 %., jumlah responden yang jabatan menjadi informasi teknologi 1 orang atau 4,17%.

D. Hasil jawaban kuesioner (Angket) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Untuk memperoleh data tentang Penerapan prinsip GCG dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 20 butir soal pertanyaan untuk 14 sampel, yaitu karyawan PT.BPRS Bnadar Lampung. Berdasarkan sebaran angket dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil jawaban kuisisioner (Angket) prinsip-prinsip GCG

1. Transparency (Keterbukaan)

Tabel 4

Transparency (Keterbukaan)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Akses informasi layanan BPRS mudah di dapatkan	18	6	0	0	0
Persentase %	75%	25%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Transparency (Keterbukaan) sebanyak 18 orang (75%) menjawab sangat setuju, 6 orang (25%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Akses informasi layanan BPRS sangat mudah di dapatkan

Tabel 5
Transparency (Keterbukaan)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Penyampaian informasi layanan sangat jelas	19	5	0	0	0
Persentase %	79,17%	20,83%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Transparency (Keterbukaan) sebanyak 19 orang (79,17%) menjawab sangat setuju, 5 orang (20,83%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi layanan BPRS sangat jelas.

Tabel 6
Transparancy (Keterbukaan)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Penyampaian Informasi layanan tepat waktu dan memadai	13	11	0	0	0
Persentase %	54,17%	45,83%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Transparancy (Keterbukaan) sebanyak 13 orang (54,17%) menjawab sangat setuju, 11 orang (45,83%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan layanan tepat waktu dan sangat memadai.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Tabel 7
Accountability (Akuntabilitas)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Penyampaian informasi layanan akurat	17	7	0	0	0
Persentase %	70,83%	29,17%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Accountability (Akuntabilitas) sebanyak 17 orang (70,83%) menjawab sangat setuju, 7 orang (29,17%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi layanan BPRS sangat akurat.

Tabel 8
Accountability (Akuntabilitas)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Kelengkapan informasi layanan cukup baik	14	10	0	0	0
Persentase %	58,33%	41,67%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Accountability (Akuntabilitas) sebanyak 14 orang (58,33%) menjawab sangat setuju, 10 orang (41,67%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi layanan sudah sangat baik.

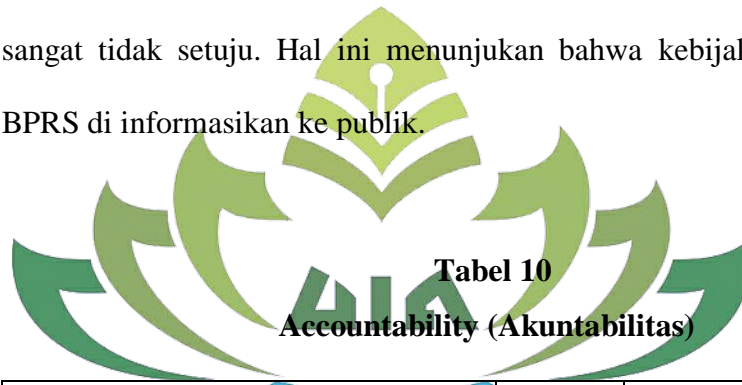
Tabel 9
Accountability (Akuntabilitas)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
------------	----	---	---	----	-----

Kebijakan yang diambil BPRS ini di informasikan ke public	9	15	0	0	0
Persentase %	37,5%	62,5%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Accountability (Akuntabilitas) sebanyak 9 orang (37,5%) menjawab sangat setuju, 15 orang (62,5%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil BPRS di informasikan ke publik.



Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	14	10	0	0	0
Persentase %	58,33%	41,67%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Accountability (Akuntabilitas) sebanyak 14 orang (58,33%) menjawab sangat setuju, 10 orang (41,67%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%)

menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Responsibility (Tanggungjawab)

Tabel 11
Responsibility (Tanggungjawab)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	16	8	0	0	0
Persentase %	66,67%	33,33%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Responsibility (Tanggungjawab) sebanyak 16 orang (66,67%) menjawab sangat setuju, 8 orang (33,33%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS sangat patuh pada peraturan perundang-undangan.

Tabel 12
Responsibility (Tanggungjawab)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar	14	10	0	0	0

Persentase %	58,33%	41,67%	0%	0%	0%
---------------------	--------	--------	----	----	----

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Responsibility (Tanggungjawab) sebanyak 14 orang (58,33%) menjawab sangat setuju, 10 orang (41,67%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS sangat peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tabel 13
Responsibility (Tanggungjawab)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS bertanggung jawab pada layanan yang diberikan pada nasabah	17	7	0	0	0
Persentase %	70,83%	29,17%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Responsibility (Tanggungjawab) sebanyak 17 orang (70,83%) menjawab sangat setuju, 7 orang (29,17%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS sangat bertanggungjawab pada layanan yang diberikan pada nasabah.

4. Indepedency (Independen)

Tabel 14
Indepedency (Independen)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS melindungi semua kepentingan nasabah	18	6	0	0	0
Persentase %	75%	25%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Indepedency (Independen) sebanyak 18 orang (75%) menjawab sangat setuju, 6 orang (25%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS sangat melindungi kepentingan nasabah.

Tabel 15
Indepedency (Independen)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan	20	4	0	0	0
Persentase %	83,33%	16,67%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Indepedency (Independen) sebanyak 20 orang (83,33%) menjawab sangat setuju, 4 orang (16,67%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan.

5. Fairness (keadilan)

Tabel 16

Fairness (keadilan)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Semua kepentingan nasabah diperlakukan sama	19	5	0	0	0
Persentase %	79,17%	20,83%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Fairness (keadilan) sebanyak 19 orang (79,17%) menjawab sangat setuju, 5 orang (20,83%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa semua kepentingan nasabah diperlakukan sama.

Tabel 17

Fairness (keadilan)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan					

	13	11	0	0	0
Persentase %	54,17%	45,83%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Fairness (keadilan) sebanyak 13 orang (54,17%) menjawab sangat setuju, 11 orang (45,83%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan.

Tabel 18
Fairness (keadilan)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS	14	10	0	0	0
Persentase %	58,33%	41,67%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Fairness (keadilan) sebanyak 14 orang (58,33%) menjawab sangat setuju, 10 orang (41,67%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS langsung menindaklanjuti keluhan nasabah.

b. Hasil Jawaban Kuesioner (Angket) Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Tabel 19
Syariah Compliance (Keatuhan Syariah)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Tidak ada riba, gharar, meisir dalam transaksi	18	6	0	0	0
Persentase %	75%	25%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Syariah Compliance sebanyak 18 orang (75%) menjawab sangat setuju, 4 orang (25%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Tidak ada riba, gharar, meisir dalam transaksi.

Tabel 20
Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal	16	8	0	0	0
Persentase %	66,67%	33,33%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Syariah Compliance sebanyak 16 orang (66,67%) menjawab sangat setuju, 8 orang (33,33%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang

(0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa BPRS menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Tabel 21
Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
BPRS menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah	16	8	0	0	0
Persentase %	66,67%	33,33%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Syariah Compliance sebanyak 16 orang (66,67%) menjawab sangat setuju, 8 orang (33,33%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah.

Tabel 22
Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
DPS berperan aktif dalam mengawasi produk/layanan BPRS	18	6	0	0	0
Persentase %	75%	25%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Syariah Compliance sebanyak 18 orang (75%) menjawab sangat setuju, 6 orang (25%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa DPS berperan sangat efektif dalam mengawasi produk/layanan BPRS

Tabel 23
Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
Pengelolaan Zakat, infaq, dan shodaqah yang amanah	16	6	0	0	0
Persentase %	72,73%	27,27%	0%	0%	0%

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket GCG mengenai Fairness (keadilan) sebanyak 16 orang (72,73%) menjawab sangat setuju, 6 orang (27,27%) menjawab setuju, 0 orang (0%) menjawab ragu-ragu, 0 orang (0%) menjawab tidak setuju, 0 orang (0%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah yang amanah.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Impelementasi Good Corporate Governance di PT.BPRS Bandar Lampung

Good Corporate Governance yang disingkat *GCG* merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Good Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan *GCG* diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari pedoman umum *Good Corporate Governance*. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perusahaan untuk memastikan terciptanya sistem perusahaan yang sehat.

Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan kondisi perekonomian Indonesia adalah belum diterapkannya *Good Corporate Governance* yang baik menjadi bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam mengaju pada Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good*

Corporete Governance dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*indenpendency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu Tapanjeh, prinsip-prinsip *Good Corporate Gavernance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis , keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia .

Prinsip-prinsip pelaksanaan GCG yang pada BPRS Bandar Lampung terdiri dari :

1. Tranparancy (Transparansi) yaitu perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relavan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.

Keterbukaan ini sangat penting dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Apabila teori menurut Syakhroza dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip transparansi yang di lakukan oleh BPRS Bandar Lampung adalah bahwa BPRS Bandar Lampung telah bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur.

Keakuratan juga menjadi prinsip yang penting dalam *Good Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang jelas dan akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Dalam sebuah perusahaan keterbukaan sangatlah diperlukan agar tidak ada kesimpangsiuran dalam mengambil tindakan, maupun kesalah pahaman yang akan berdampak buruk kepada semua pihak.

Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* di BPRS Bandar Lampung dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan sangat baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Contohnya adanya keterbukaan informasi baik dalam hal pendanaan maupun lainnya.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan independen.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu berupa bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya demi kemaslahatan umat.

Apabila teori menurut Syakhroza dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Akuntabilitas yang di lakukan oleh BPRS Bandar Lampung baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Penyampaian informasinya sudah berjalan baik juga, dan kelengkapan informasi layanan sangat baik, kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini berdasarkan persentase hasil jawaban sebaran kuesioner dapat dilihat di bab 3.

3. Responsibility (Responsibilitas)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.

Pertanggung jawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stake holder dapat mengambil keputusan yang tepat.

Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu perduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita. Dalam Ekonomi Islam pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan dalam membayar zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya setidaknya ada 2,5% yang menjadi

hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif ekonomi Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir miskin.

Apabila teori menurut Syakhroza dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Responsibility yang di lakukan oleh BPRS Bandar Lampung, menurut persentase hasil jawaban kuesioner responden menyatakan bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

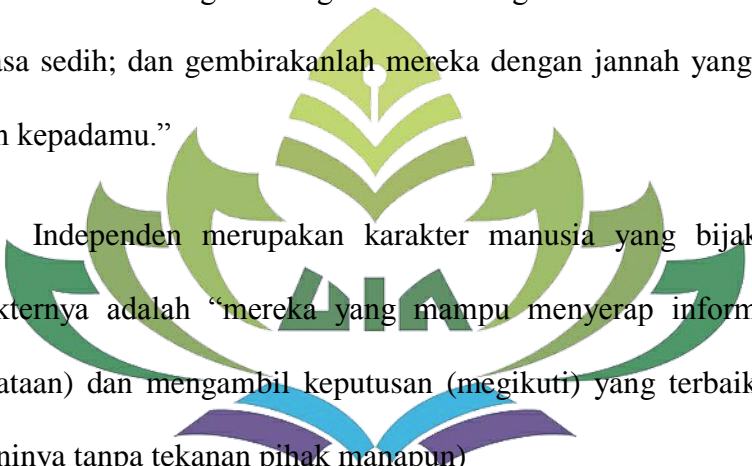
4. Independency (Indepedensi)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung

jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *Istiqomah* yaitu berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko sesuai QS.Fushshilat:30 berikut ini

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”



Independen merupakan karakter manusia yang bijak yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)

Apabila teori menurut Syakhroza dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Independensi yang di lakukan oleh BPRS Bandar Lampung menurut persentase hasil jawaban kuesioner yaitu BPRS melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi Teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, prinsip independensi sudah sangat baik dalam penerapannya.

5. Fairness (Keadilan/kewajaran)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Dengan kata lain Islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.

Dari hasil wawancara dengan Direktur BPRS Bapak Marsono, S.E sebagai pemimpin yaitu dalam proses penerapannya keadilan, beliau sudah menerapkannya dalam bekerja dibangun kerjasama yang sehat untuk memotivasi agar bekerja dengan giat, misalnya karyawan yang bekerja dengan baik maka akan dinaikkan jabatannya, dan karyawan yang melanggar peraturan

maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan (SP). Kemudian dari hasil jawaban sebaran jawaban kuesioner adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan, Keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS. Hal ini berdasarkan persentase jawaban responden dapat dilihat di bab 3. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip keadilan di BPRS ini sudah diterapkan dengan sangat baik.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* sangat penting terhadap perbankan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), independensi (*indenpendency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Pada BPRS Bandar Lampung dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan sangat baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Contohnya adanya keterbukaan informasi baik dalam hal pendanaan maupun lainnya. Prinsip Akuntabilitas yang di lakukan oleh BPRS Bandar Lampung baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Penyampaian informasinya sudah berjalan baik juga, dan kelengkapan informasi layanan sangat baik, kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsip Responsibility bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar

dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Pada prinsip Independensi BPRS Bandar Lampung melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi prinsip independensi sudah sangat baik dalam penerapannya. Kemudian pada prinsip Fairness adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan, Keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS. Jadi dari ke lima prinsip Good Corporate Governance diatas sudah diterapkan dengan sangat baik oleh BPRS Bandar Lampung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* sangat penting terhadap perbankan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independence*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Pada BPRS Bandar Lampung dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan sangat baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Prinsip Akuntabilitas yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Pada prinsip Responsibility bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Pada prinsip Independensi BPRS Bandar Lampung melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada prinsip Fairness adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk

memberikan masukan ataupun kritikan, Keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS.

B. Saran

Melihat kesimpulan yang telah diuraikan diatas, untuk penerapan *GCG* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pada PT. BPRS Bandar Lampung maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan *GCG* perusahaan atau perbankan harus mempunyai prinsip mewujudkan bisnis yang transparansi (transparancy), akuntabilitas (Accountability, responsibilitas (responsibility), Independen (Independency), dan keadilan atau kewajaran (Fairness).
2. Dalam penerapan *GCG* perusahaan juga harus menerapkan perspektif ekonomi Islam yaitu dengan jujur dalam transaksi, tidak menyembunyikan informasi, amanah, dan menepati janji.
3. Bagi karyawan terus mendukung program perusahaan yang menerapkan *GCG* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafei, Muhammad, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan*, Jakarta Tazkia Institute, 1999.

Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik, Edisi Revisi, V Cetakan, keduabelas*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arikuto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Chapra, M.Umer dan Habib Ahmed, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islamic Development Bank, 2002.

Chapra, Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Departemen Agama RI, *Al Ally, Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Cp Penerbit diponogoro, 2005.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: graha ilmu, 2012.

Hasan, M.Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, cet.ke-13*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.

Keberlangsungan bisnis syariah dengan menerapkan *Good Governance* terefleksi bagaimana perusahaan memperhatikan *stakeholders* perusahaan, memberikan

nilai tambah (*add value*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Lihat Moh Ghofur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*.

Meleong L Lexy, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Masyudi, Muqorobin, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah : Purwokerto.

Nuruddin, Amiur dan Veithzal Rivai, *Islamic Bussines and economic Ethic*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah(UUS) pada bagian umum.

Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Ayat 10.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Afabeta, 2014.

Usman, Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar, Jakarta: Grafika, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, AsaMandiri, 2008

Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung: Alfabeta, 2008.

